

TESIS

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM
JARINGAN SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI**



Oleh:

Nino Andria Yudianto

NIM : 2120215310002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2023

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBASIS DALAM JARINGAN SEBAGAI
TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**Nino Andria Yudianto
NIM : 2120215310002**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**JUDUL : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM
JARINGAN SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA
REVOLUSI INDUSTRI**

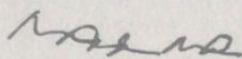
NAMA : NINO ANDRIA YUDIANTO

NIM : 2120215310002

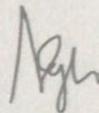
**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

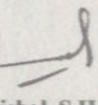
Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

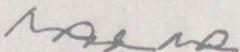
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

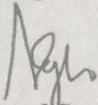
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nino Andria Yudianto
NIM : 2120215310002
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nino Andria Yudianto
NIM. 2120215310002

**Tesis ini Telah Dinilai dan Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
: 2. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
: 3. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

YUDIANTO, NINO ANDRIA. 2023. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI. Program Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad S.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata kunci : Produk hukum daerah, Jaringan, Revolusi Industri

Tesis yang berjudul Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis Dalam Jaringan Sebagai Transformasi Pelayanan Hukum Di Era Revolusi Industri bertujuan Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan produk hukum daerah berbasis dalam jaringan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, mulai dari proses pengajuan, fasilitasi, harmonisasi, finalisasi, legalisasi, dan pengundangannya dan mengkaji apakah produk hukum daerah yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis dalam jaringan telah memenuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku hingga telah memenuhi Azas-azas Umum Perundang-undangan yang Baik. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil yang diperoleh bahwa Suatu produk hukum daerah yang baik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat perkembangan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti produk hukum daerah banyak daerah dalam pembentukannya memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan secara umum teknologi informasi dalam hubungan hukum memang mempunyai landasan hukum tetapi secara khusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penggunaan teknologi informasi belum ada. Pada uji perundang-undangan atau yudisial review umumnya memang menyangkut aspek materiil, tetapi juga ada ditemukan uji aspek formil. Penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi menjadikan cacat prosedural, sehingga dalam penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum daerah mempunyai landasan hukumnya.

YUDIANTO, NINO ANDRIA. 2023. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI. Program Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad S.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords: Local law products, Network, Industrial Revolution

The thesis entitled Formation of Network-Based Regional Legal Products as a Transformation of Legal Services in the Industrial Revolution Era aims to find out how the process of establishing network-based regional legal products is carried out by the Government, starting from the process of submission, facilitation, harmonization, finalization, legalization, and promulgation. and examine whether local legal products produced by using information technology based on the network have complied with the applicable legal provisions and norms so that they have complied with the General Principles of Good Legislation. Writing this thesis is normative legal research, namely research conducted by examining literature or legal materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

The results obtained are that a good regional legal product must meet the formal and material requirements according to the applicable laws and regulations. As a result of the development of information technology in the formation of laws and regulations such as regional legal products, many regions in their formation make use of information technology. In general, the use of information technology in legal relations does have a legal basis, but specifically in the formation of laws and regulations the use of information technology does not yet exist. In statutory tests or judicial reviews, generally it concerns material aspects, but there are also tests on formal aspects. The use of information technology in the formation of regional legal products, including the formal aspects of the formation of laws and regulations, has the potential to cause procedural defects, so that the use of information technology in the formation of regional legal products has a legal basis.

YUDIANTO, NINO ANDRIA. 2023. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI. Program Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad S.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

RINGKASAN

Sesuai dengan Perkembangan ilmu, teknologi, yang saat ini memasuki revolusi industri, penggunaan teknologi informasi merupakan sebuah kebutuhan bagi instansi yang diberi wewenang dalam proses pembentukan produk daerah agar dapat mencapai kinerja dan pelayanan yang optimal maka di perlukan aplikasi yang dapat menjadi sebuah sistem pengajuan rancangan produk hukum daerah berbasis dalam jaringan (daring). Dengan adanya aplikasi ini pemangkasan birokrasi, pemangkasan anggaran, dan peningkatan kinerja yang tidak terikat ruang dan waktu bisa terwujud. Dengan adanya aplikasi ini juga menjadikan perangkat daerah atau *stakeholder* terkait lainnya yang berkepentingan dalam pembentukan produk hukum daerah dapat menjalankan proses pengajuan rancangan produk hukum daerah dimana pun dan kapan pun.

Secara umum Penggunaan IT terdapat pada tiga UU : 1. UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU 19/2016 dan 3. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya UU 12/2011 tetapi dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1): Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. Jadi yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan penggunaan IT hanya mengenai penyebar luasan saja.

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri dari asas formil dan materiil. Asas formil itu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis tingkatan dan materi pembuatan. Produk hukum harus dilaksanakan, memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. sedang asas materiil menyangkut materi muatan kondisi khusus daerah bermakna bahwa produk daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah.

Sering ditemukan jenis dan materi produk aturan hukum yang diusulkan daerah tidak sinkron dengan azas hukum dimaksud, sehingga pada tahap pelaksanaan, produk hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kelemahan lain, pemerintah daerah dalam merancang atau membuat produk hukum daerah adalah tidak simplifikasi atau terlalu rumit, tidak sederhana. Hasil evaluasi juga

ditemukan ada beberapa satuan perangkat kerja daerah membuat aturan masing-masing tanpa memperhatikan asas hukum atau prinsip hukum tersebut.

Program digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah agar masyarakat semakin mudah berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lima digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu aplikasi partisipasi masyarakat (*e-partisipasipublik*), aplikasi pengundangan peraturan perundang-undangan (*e-pengundangan*) dan aplikasi untuk putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan (*e-litigasi*).

Dengan ditetapkannya UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011, Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik

Para ahli hukum, umumnya menyatakan bahwa salah satu ukuran dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas dapat dilihat dari tahapan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (aspek formal). Tidak dipenuhinya asas formal pembentukan peraturan perundangan berimplikasi cacat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dalam yudisial review yang di MK dan MA.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia termasuk dalam pembentukan hukum seperti pembentukan produk hukum daerah. Banyak kemudahan yang didapat akibat kemajuan teknologi informasi dibandingkan dilakukan secara konvensional. Untuk memasukkan dalam prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah kedalam penggunaan teknologi informasi merupakan persoalan hukum yang perlu dipecahkan.

Secara umum ada Ketentuan Pasal 97 UU 13/2022 bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian lebih rinci Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 14 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BERBASIS DALAM JARINGAN. Untuk melegalisasi Produk HUKUM Daerah dengan menggunakan IT, maka selain harus terinci dan bentuk hukum bisa UU maupun Perda bagi produk hukum daerah.

Suatu produk hukum daerah yang baik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat perkembangan teknologi informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti produk hukum daerah banyak daerah dalam pembentukannya memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan secara umum teknologi informasi dalam hubungan hukum memang mempunyai landasan hukum tetapi secara khusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penggunaan teknologi informasi belum ada. Pada uji perundang-undangan atau yudisial review umumnya memang menyangkut aspek materiil, tetapi juga ada ditemukan uji aspek formil. Penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi menjadikan cacat prosedural, sehingga dalam penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan produk hukum daerah mempunyai landasan hukumnya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI DENGAN NIAT UNTUK MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA SEBAGAI PERWUJUDAN PENGABDIANKU KEPADA ALLAH SWT.

UNTUK ORANG – ORANG TERCINTA:
KEDUA ORANG TUA DAN SAUDARA -SAUDARA PENELITI, IBNU HASAN (ALM) DAN YULIARTI ATAS, NOVIE ANDHIKA FEBRIANTO, NONO ACHDIAT DEWANTO, NOORMAN ANDHIKA YOGASWARA DAN SI KECIL “SHANIA” DUKUNGAN MORAL DAN MATERIIL

KEDUA PUTRI TERCINTA, FANNY PUTRI INDRA MAHADEWI DAN FELICIA YUNITA INDRA MAHARANI YANG SELALU MENDUKUNG DAN MENGUATKAN UPAYA DALAM MENGGAPAI SEMUA CITA-CITA SERTA ATAS SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH SAYANG SERTA DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

TEMAN DAN SAHABAT TERBAIK
Dr. EMMA, Sp.PK, M. Kes YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MOTIVASI SEJAK AWAL MELANGKAH MENJALANI PERKULIAHAN HINGGA MENYELESAIKAN STUDI DI PROGRAM MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

GURU, DOSEN, KELUARGA, SENIOR DAN TEMAN-TEMAN ATAS DOA MOTIVASI DAN SEMANGAT YANG DIBERIKAN KEPADA PENELITI.

PENULIS UCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR- BESARNYA ATAS SELURUH DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.

"SUKSES BUKANLAH FINAL; KEGAGALAN TIDAK FATAL: INI ADALAH KEBERANIAN UNTUK MELANJUTKAN YANG PENTING."

- WINSTON S. CHURCHILL -

BEKERJA DENGAN HATI NAMUN HATI-HATI

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN SEBAGAI TRANSFORMASI PELAYANAN HUKUM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI**”. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasanya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si, Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya;
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Pengganti yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Muhammad Hadin Muhjad S.H., M.Hum. dan Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.(alm). selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;

4. Bapak Dr. Ichsan Anwary, S.H, M.H dan Prof. Dr. Mirza Satria Buana, S.H, M.H selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini;
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Bupati Kotawaringin Timur, Bapak H. Halikinnor, SH, MM sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kotawaringin Timur atas perkenannya untuk memberikan Ijin Belajar kepada penulis sehingga dapat melaksanakan studi pada program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat;
7. Papa Ibnu Hasan (alm), Mama Yuliarti, Saudara-saudaraku Novie Andhika Febrianto, S.TP, Nono Achdiat Dewanto, S.E, dan Noorman Andhika Yogaswara, serta si kecil “Shania” yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. keluarga, penulis tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Abah dan Mama berikan kepada penulis. Penulis tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga penulis;
8. Putri-putriku tercinta, Fanny Putri Indra Mahadewi dan Felicia “Adek” Yunita Indra Maharani yang menjadi inspirasi untuk selalu menguatkan penulis dalam menjalani studi mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat ini;
9. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
10. Teman dan Sahabat Terbaik, dr. Emma, Sp.PK, M.Kes yang menjadi sumber dan selalu memotivasi serta meberikan dukungan kepada saya untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang pasca sarjana ini;
11. Sahabat dan teman-teman Penulis, Tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, dan Bagian Perundang-undangan, Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur terimakasih atas bantuan, pemikiran kritikan yang membangun, saran, dan motivasi serta doa yang kalian berikan..
12. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang mena telah sama-sama berjuang dari semester satu sampai akhir.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 14 Juli 2023
Hormat Penulis,

Nino Andria Yudianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah	13
b. Teori Sistem Hukum.....	14
c. Teori Penjenjangan Norma Hukum.....	16
d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.....	20
e. Teori Momentum.....	24
2. Kerangka Konseptual	26
a. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.	26

b. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundangundangan	28
c. Tinjauan tentang Produk Hukum Daerah	33
F. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian.....	36
3. Tipe penelitian	36
4. Pendekatan Penelitian.....	36
5. Sumber Bahan Hukum	37
6. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	37
7. Analisis Bahan Hukum.....	38
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	38
BAB II	40
RATIO LEGIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM	
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN	
PRINSIP HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.....	40
A. Dasar Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	40
B. Prinsip Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah	48
C. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	54
BAB III.....	65
LEGALITAS PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIHASILKAN	
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS JARINGAN	65
A. Cacat Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah	65
B. Dampak Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menggunakan Teknologi Informasi	75
C. Keabsahan Produk Hukum Daerah yang dihasilkan menggunakan Teknologi Informasi.....	88
BAB IV	99
PENUTUP.....	99

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**